



# **PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT**

**NOMOR : 03 TAHUN 2013**

**TANGGAL : 9 NOPEMBER 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PERUBAHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2013**



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAYBRAT**

**NOMOR : 03 TAHUN 2013**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAYBRAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD-P serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal ... Oktober 2013 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 14);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
14. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAYBRAT**

dan

**BUPATI MAYBRAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2013

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 614.242.321.395,00	
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 689.318.566.258,20</u> (-)	
Surplus/(Defisit)		Rp. (75.076.244.863,20)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp. 82.604.620.776,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 7.500.000.000,00</u> (-)	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 75.104.620.776,00</u> (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :		Rp. 28.375.912,80

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. 4.243.064.078,00   |
| b. Dana Perimbangan                     | Rp. 482.142.281.353,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp. 127.856.975.964,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Retribusi Daerah                                  | Rp. 700.000.000,00   |
| b. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. 694.435.932,00   |
| c. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah         | Rp. 2.848.628.146,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah	Rp.	0,00
b. Dana darurat	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp.	43.692.272.964,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	81.766.000.000,00
e. Dana Tunjangan Profesi/Tambahan Penghasilan Guru	Rp.	2.398.703.000,00
f. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	Rp.	0,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	179.513.950.803,20
b. Belanja Langsung	Rp.	509.804.615.455,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai	Rp.	111.992.350.803,20
b. Belanja bunga	Rp.	0,00
c. Belanja subsidi	Rp.	0,00
d. Belanja hibah	Rp.	14.779.200.000,00
e. Belanja bantuan sosial	Rp.	27.905.000.000,00
f. Belanja bagi hasil	Rp.	0,00
g. Belanja bantuan keuangan	Rp.	24.837.400.000,00
h. Belanja tidak terduga	Rp.	0,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai	Rp.	41.450.176.397,00
b. Belanja belanja barang dan jasa	Rp.	171.399.895.643,00
c. Belanja modal	Rp.	296.954.543.415,00

### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp.	82.604.620.776,00
b. Pengeluaran	Rp.	7.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	Rp.	82.604.620.776,00
b. Pencairan dana cadangan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp.	0,00
f. Penerimaan piutang daerah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD-P ;
2. Lampiran II Ringkasan APBD-P menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian APBD-P menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya ;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

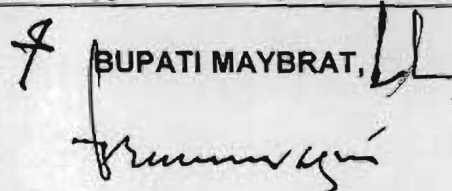
### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD-P.

### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Ayamaru  
Pada tanggal : 09 Nopember 2013

  
BUPATI MAYBRAT,

Drs. BERNARD SAGRIM, M.M.

Diundangkan di : Ayamaru  
Pada tanggal : 09 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH,





**PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT**  
**UNIT ORGANISASI**

Tahun Anggaran 2013

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI
1	<b>Urusan Wajib</b>
1.01	<b>Pendidikan</b>
1.01.1	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01.1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	<b>Kesehatan</b>
1.02.1	<b>Dinas Kesehatan</b>
1.02.1.1	Dinas Kesehatan
1.03	<b>Pekerjaan Umum</b>
1.03.1	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>
1.03.1.1	Dinas Pekerjaan Umum
1.06	<b>Perencanaan Pembangunan</b>
1.06.1	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
1.06.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.07	<b>Perhubungan</b>
1.07.1	<b>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>
1.07.1.1	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.08	<b>Lingkungan Hidup</b>
1.08.1	<b>Kantor Lingkungan Hidup</b>
1.08.1.1	Kantor Lingkungan Hidup
1.10	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>
1.10.1	<b>Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>
1.10.1.1	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.11	<b>Pemberdayaan Perempuan</b>
1.11.1	<b>Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</b>
1.11.1.1	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.13	<b>Sosial</b>
1.13.1	<b>Dinas Sosial</b>
1.13.1.1	Dinas Sosial
1.15	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>
1.15.1	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
1.15.1.1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.18	<b>Pemuda dan Olah Raga</b>
1.18.1	<b>Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata</b>
1.18.1.1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
1.19	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>
1.19.1	<b>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>
1.19.1.1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.2	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>
1.19.2.1	Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.3	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>
1.19.3.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.20	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat</b>
1.20.1	<b>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
1.20.1.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.2	<b>Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>
1.20.2.1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20.3	<b>Sekretariat Daerah</b>
1.20.3.1	Sekretariat Daerah
1.20.4	<b>Sekretariat DPRD</b>
1.20.4.1	Sekretariat DPRD



**PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT****UNIT ORGANISASI**

Tahun Anggaran 2013

<b>KODE</b>	<b>NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI &amp; SUB UNIT ORGANISASI</b>
1.20.8.1	Distrik Aifat Utara
1.20.9	<b>Distrik Aifat Timur</b>
1.20.9.1	Distrik Aifat Timur
1.20.10	<b>Distrik Aifat Selatan</b>
1.20.10.1	Distrik Aifat Selatan
1.20.11	<b>Distrik Aitinyo Barat</b>
1.20.11.1	Distrik Aitinyo Barat
1.20.12	<b>Distrik Aitinyo</b>
1.20.12.1	Distrik Aitinyo
1.20.13	<b>Distrik Aitinyo Utara</b>
1.20.13.1	Distrik Aitinyo Utara
1.20.14	<b>Distrik Ayamaru</b>
1.20.14.1	Distrik Ayamaru
1.20.15	<b>Distrik Ayamaru Utara</b>
1.20.15.1	Distrik Ayamaru Utara
1.20.16	<b>Distrik Ayamaru Timur</b>
1.20.16.1	Distrik Ayamaru Timur
1.20.17	<b>Distrik Mare</b>
1.20.17.1	Distrik Mare
1.20.18	<b>Distrik Aifat Timur Tengah</b>
1.20.18.1	Distrik Aifat Timur Tengah
1.20.19	<b>Distrik Aifat Timur Selatan</b>
1.20.19.1	Distrik Aifat Timur Selatan
1.20.20	<b>Distrik Aifat Timur Jauh</b>
1.20.20.1	Distrik Aifat Timur Jauh
1.20.21	<b>Distrik Aitinyo Tengah</b>
1.20.21.1	Distrik Aitinyo Tengah
1.20.22	<b>Distrik Aitinyo Raya</b>
1.20.22.1	Distrik Aitinyo Raya
1.20.23	<b>Distrik Ayamaru Jaya</b>
1.20.23.1	Distrik Ayamaru Jaya
1.20.24	<b>Distrik Ayamaru Timur Selatan</b>
1.20.24.1	Distrik Ayamaru Timur Selatan
1.20.25	<b>Distrik Ayamaru Selatan</b>
1.20.25.1	Distrik Ayamaru Selatan
1.20.26	<b>Distrik Ayamaru Selatan Jaya</b>
1.20.26.1	Distrik Ayamaru Selatan Jaya
1.20.27	<b>Distrik Ayamaru Tengah</b>
1.20.27.1	Distrik Ayamaru Tengah
1.20.28	<b>Distrik Ayamaru Barat</b>
1.20.28.1	Distrik Ayamaru Barat
1.20.29	<b>Distrik Ayamaru Utara Timur</b>
1.20.29.1	Distrik Ayamaru Utara Timur
1.20.30	<b>Distrik Mare Selatan</b>
1.20.30.1	Distrik Mare Selatan
1.20.31	<b>Kelurahan Ayamaru</b>
1.20.31.1	Kelurahan Ayamaru
1.20.32	<b>Dinas Pendapatan</b>
1.20.32.1	Dinas Pendapatan
1.20.33	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>
1.20.33.1	Badan Kepegawaian Daerah
1.21	<b>Ketahanan Pangan</b>
1.21.1	<b>Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan</b>
1.21.1.1	Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1.22	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>

KABUPATEN MAYBRAT

LAMPIRAN 1

NEHAF SAI BONOUT SAI

**PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2013

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
2	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN</b>	592.086.718.228,00	614.242.321.395,00	22.155.603.167,00	3,74
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	2.455.956.087,00	4.243.064.078,00	1.787.107.991,00	72,77
Hasil Retribusi Daerah	315.000.000,00	700.000.000,00	385.000.000,00	122,22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	140.956.087,00	694.435.932,00	553.479.845,00	392,66
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.000.000.000,00	2.848.628.146,00	848.628.146,00	42,43
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	482.642.466.502,00	482.142.281.353,00	(500.185.149,00)	(0,10)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43.773.683.502,00	43.273.498.353,00	(500.185.149,00)	(1,14)
Dana Alokasi Umum	353.978.783.000,00	353.978.783.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	84.890.000.000,00	84.890.000.000,00	0,00	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	106.988.295.639,00	127.856.975.964,00	20.868.680.325,00	19,51
Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	23.563.729.639,00	43.692.272.964,00	20.128.543.325,00	85,42
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	81.766.000.000,00	81.766.000.000,00	0,00	0,00
Dana Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.658.566.000,00	2.398.703.000,00	740.137.000,00	44,63
<b>PENDAPATAN BUKAN DAERAH</b>	647.693.887.067,00	689.318.566.258,20	41.624.679.191,20	6,43
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	195.404.583.818,00	179.513.950.803,20	(15.890.633.014,80)	(8,13)
Belanja Pegawai	134.842.983.818,00	111.992.350.803,20	(22.850.633.014,80)	(16,95)
Belanja Hibah	11.879.200.000,00	14.779.200.000,00	2.900.000.000,00	24,41
Belanja Bantuan Sosial	23.745.000.000,00	27.905.000.000,00	4.160.000.000,00	17,52
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	24.837.400.000,00	24.837.400.000,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	452.289.303.249,00	509.804.615.455,00	57.515.312.206,00	12,72
Belanja Pegawai	39.414.085.000,00	41.450.176.397,00	2.036.091.397,00	5,17
Belanja Barang dan Jasa	146.127.226.548,00	171.399.895.643,00	25.272.669.095,00	17,29
Belanja Modal	266.747.991.701,00	296.954.543.415,00	30.206.551.714,00	11,32
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(55.607.168.839,00)	(75.076.244.863,20)	(19.469.076.024,20)	35,01

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
	3	4	5	6
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	65.607.168.839,00	82.604.620.776,00	16.997.451.937,00	25,91
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65.607.168.839,00	82.604.620.776,00	16.997.451.937,00	25,91
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	10.000.000.000,00	7.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(25,00)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(50,00)
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	55.607.168.839,00	75.104.620.776,00	19.497.451.937,00	35,06
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	28.375.912,80	28.375.912,80	0,00



Maybrat, 9 Nopember 2013

BUPATI MAYBRAT

BERNARD SAGRIM, M.M.

KABUPATEN MAYBRAT

LAMPIRAN 2

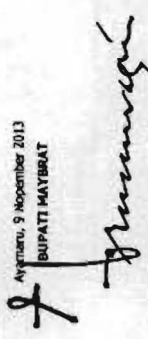
NEHAF SAI BONOUT SAI

**PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
 TAHUN ANGGARAN 2013

N PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			Rp	%	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	Rp	%
	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
	592.066.718.228,00	614.242.321.395,00	22.155.603.167,00	3,74	181.931.177.818,00	420.844.015.050,00	602.775.192.868,00	171.794.078.597,20	475.619.685.106,00	647.413.763.701,20	44.638.570.835,20	7,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	27.808.734.740,00	53.402.972.924,00	81.211.707.664,00	30.132.285.199,00	57.937.107.630,00	88.069.392.829,00	6.857.685.165,00	8,44
an Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	27.808.734.740,00	53.402.972.924,00	81.211.707.664,00	30.132.285.199,00	57.937.107.630,00	88.069.392.829,00	6.857.685.165,00	8,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514.743.118,00	34.397.283.400,00	43.912.026.518,00	9.131.649.147,00	37.494.525.330,00	46.626.174.477,00	2.714.147.959,00	6,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514.743.118,00	34.397.283.400,00	43.912.026.518,00	9.131.649.147,00	37.494.525.330,00	46.626.174.477,00	2.714.147.959,00	6,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.387.730,00	169.618.648.430,00	172.535.036.160,00	3.462.188.083,00	183.086.947.430,00	186.549.135.513,00	14.014.099.353,00	8,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.387.730,00	169.618.648.430,00	172.535.036.160,00	3.462.188.083,00	183.086.947.430,00	186.549.135.513,00	14.014.099.353,00	8,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.800.000,00	988.800.000,00	988.800.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.800.000,00	988.800.000,00	988.800.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.992.416,00	10.291.520.630,00	13.314.113.046,00	2.495.725.751,00	10.917.530.630,00	13.413.256.381,00	99.143.335,00	0,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.992.416,00	10.291.520.630,00	13.314.113.046,00	2.495.725.751,00	10.917.530.630,00	13.413.256.381,00	99.143.335,00	0,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.757.000,00	4.616.157.000,00	7.514.914.000,00	1.847.954.180,00	14.191.093.000,00	16.039.047.180,00	8.524.133.180,00	113,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.757.000,00	4.616.157.000,00	7.514.914.000,00	1.847.954.180,00	14.191.093.000,00	16.039.047.180,00	8.524.133.180,00	113,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.429.496,00	3.441.896.380,00	4.552.325.876,00	1.242.939.994,00	3.441.896.380,00	4.684.836.374,00	132.510.498,00	2,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.429.496,00	3.441.896.380,00	4.552.325.876,00	1.242.939.994,00	3.441.896.380,00	4.684.836.374,00	132.510.498,00	2,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348.808.000,00	2.449.394.000,00	5.798.202.000,00	2.054.662.059,00	2.449.394.000,00	4.504.056.059,00	(1.294.145.941,00)	(22,32)
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348.808.000,00	2.449.394.000,00	5.798.202.000,00	2.054.662.059,00	2.449.394.000,00	4.504.056.059,00	(1.294.145.941,00)	(22,32)
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.011.000,00	2.410.471.136,00	3.495.482.136,00	494.294.677,00	2.410.471.136,00	2.904.765.813,00	(590.716.323,00)	(16,90)
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.011.000,00	2.410.471.136,00	3.495.482.136,00	494.294.677,00	2.410.471.136,00	2.904.765.813,00	(590.716.323,00)	(16,90)
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.551.000,00	9.871.500.000,00	11.708.051.000,00	1.247.822.367,00	8.862.900.000,00	10.110.722.367,00	(1.597.328.633,00)	(13,64)
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.551.000,00	9.871.500.000,00	11.708.051.000,00	1.247.822.367,00	8.862.900.000,00	10.110.722.367,00	(1.597.328.633,00)	(13,64)
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681.646.000,00	3.446.922.630,00	7.128.568.630,00	1.724.982.776,00	3.446.922.630,00	5.171.905.406,00	(1.956.663.224,00)	(27,45)
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681.646.000,00	3.446.922.630,00	7.128.568.630,00	1.724.982.776,00	3.446.922.630,00	5.171.905.406,00	(1.956.663.224,00)	(27,45)
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.787.000,00	1.300.000.000,00	3.471.787.000,00	1.165.985.394,00	1.300.000.000,00	2.465.985.394,00	(1.005.801.606,00)	(4,97)
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.787.000,00	1.300.000.000,00	3.471.787.000,00	1.165.985.394,00	1.300.000.000,00	2.465.985.394,00	(1.005.801.606,00)	(4,97)
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358.840.000,00	5.435.905.761,00	10.794.754.761,00	2.078.946.787,00	5.603.558.630,00	7.632.505.417,00	(3.162.249.345,00)	(29,29)
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.086.000,00	1.900.000.000,00	3.656.086.000,00	809.654.411,00	1.900.000.000,00	2.709.654.411,00	(946.431.589,00)	(25,89)
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.232.000,00	2.286.000.000,00	4.653.232.000,00	653.373.796,00	2.286.000.000,00	2.939.373.796,00	(1.713.858.204,00)	(36,83)
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.531.000,00	1.249.905.762,00	2.485.436.762,00	565.918.580,00	1.417.358.630,00	1.983.477.210,00	(501.959.552,00)	(20,20)
	592.066.718.228,00	614.242.321.395,00	22.155.603.167,00	3,74	112.342.311.318,00	113.611.614.400,00	225.953.925.718,00	110.967.165.425,20	136.938.809.952,00	247.905.975.377,20	21.952.049.659,20	9,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904.617.800,00	0,00	4.904.617.800,00	4.979.040.528,00	0,00	4.979.040.528,00	74.422.728,00	1,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	305.406.000,00	0,00	305.406.000,00	314.298.000,00	0,00	314.298.000,00	8.892.000,00	2,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784.233.990,00	53.485.306.000,00	60.269.539.990,00	8.587.464.342,00	62.300.514.910,00	70.887.979.252,00	10.616.439.262,00	17,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.907.000,00	11.696.266.000,00	14.915.172.000,00	3.539.323.282,20	15.495.966.000,00	23.035.288.382,20	8.120.116.292,20	54,44
	591.771.718.228,00	613.542.321.395,00	21.770.603.167,00	3,68	63.464.964.416,00	36.193.903.400,00	99.658.867.816,00	68.952.574.833,00	37.083.422.125,00	106.035.996.958,00	6.377.129.142,00	6,40

No	Kategori	PENDAPATAN				BELANJA				BETAWAH / (BERKURANG)			
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
2		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	5.699.947.000,00	1.537.992.912,00	3.112.250.000,00	4.653.942.912,00	1.000.000.000,00	14,26	
		0,00	0,00	2.095.947.000,00	0,00	790.000.000,00	2.175.951.000,00	2.175.951.000,00	250.000.000,00	2.425.902.000,00	(112.948.000,00)	(9,43)	
		0,00	0,00	1.893.353.000,00	0,00	250.000.000,00	2.043.353.000,00	1.394.175.091,00	250.000.000,00	1.694.175.091,00	(418.178.909,00)	(20,41)	
		0,00	0,00	1.066.647.000,00	0,00	250.000.000,00	1.316.647.000,00	857.744.930,00	250.000.000,00	1.067.744.930,00	(249.897.070,00)	(17,74)	
		0,00	0,00	1.217.000.000,00	0,00	250.000.000,00	1.467.000.000,00	857.744.930,00	250.000.000,00	1.107.744.930,00	(359.255.070,00)	(24,49)	
		0,00	0,00	1.872.541.000,00	0,00	250.000.000,00	1.622.541.000,00	1.612.361.000,00	250.000.000,00	1.362.361.000,00	(260.180.000,00)	(16,42)	
		0,00	0,00	1.562.749.000,00	0,00	250.000.000,00	1.812.749.000,00	1.812.749.000,00	250.000.000,00	1.562.749.000,00	(250.000.000,00)	(16,08)	
		0,00	0,00	2.182.664.000,00	0,00	300.000.000,00	2.482.664.000,00	2.023.985.552,00	300.000.000,00	1.723.985.552,00	(758.678.448,00)	(30,46)	
		0,00	0,00	1.493.329.000,00	0,00	250.000.000,00	1.743.329.000,00	1.493.329.000,00	250.000.000,00	1.493.329.000,00	(250.000.000,00)	(16,73)	
		0,00	0,00	1.555.441.000,00	0,00	200.000.000,00	1.755.441.000,00	1.805.441.000,00	250.000.000,00	1.555.441.000,00	(250.000.000,00)	(16,08)	
		0,00	0,00	1.503.039.000,00	0,00	250.000.000,00	1.753.039.000,00	1.753.039.000,00	250.000.000,00	1.503.039.000,00	(250.000.000,00)	(16,65)	
		0,00	0,00	1.004.433.000,00	0,00	250.000.000,00	1.254.433.000,00	637.000.433,00	250.000.000,00	887.000.433,00	(367.432.566,00)	(29,29)	
		0,00	0,00	682.658.000,00	0,00	250.000.000,00	932.658.000,00	498.141.182,00	250.000.000,00	748.141.182,00	(184.516.818,00)	(19,68)	
		0,00	0,00	1.078.630.000,00	0,00	250.000.000,00	1.328.630.000,00	791.802.214,00	250.000.000,00	1.041.802.214,00	(286.827.786,00)	(21,69)	
		0,00	0,00	992.654.000,00	0,00	250.000.000,00	1.242.654.000,00	741.342.623,00	250.000.000,00	991.342.623,00	(251.311.377,00)	(20,22)	
		0,00	0,00	835.319.000,00	0,00	250.000.000,00	1.085.319.000,00	594.619.961,00	250.000.000,00	844.619.961,00	(90.699.039,00)	(10,62)	
		0,00	0,00	637.435.000,00	0,00	250.000.000,00	887.435.000,00	497.076.836,00	250.000.000,00	747.076.836,00	(140.358.164,00)	(15,82)	
		0,00	0,00	901.031.000,00	0,00	250.000.000,00	1.151.031.000,00	597.966.189,00	250.000.000,00	947.966.189,00	(204.064.811,00)	(26,39)	
		0,00	0,00	856.780.000,00	0,00	250.000.000,00	1.106.780.000,00	646.659.367,00	250.000.000,00	896.659.367,00	(210.120.633,00)	(24,52)	
		0,00	0,00	662.783.100,00	0,00	250.000.000,00	912.783.100,00	579.877.833,00	250.000.000,00	829.877.833,00	(82.905.267,00)	(10,41)	
		0,00	0,00	856.780.000,00	0,00	250.000.000,00	1.106.780.000,00	715.794.111,00	250.000.000,00	865.794.111,00	(241.023.889,00)	(28,14)	
		0,00	0,00	637.435.000,00	0,00	250.000.000,00	887.435.000,00	615.769.300,00	200.000.000,00	815.769.300,00	(71.665.700,00)	(8,25)	
		315.000.000,00	12,22	1.109.539.612,00	385.000.000,00	2.916.140.000,00	4.156.719.012,00	1.570.041.529,00	5.973.192.517,00	7.543.234.446,00	3.307.515.434,00	91,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.465.000,00	2.703.465.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	787.062.000,00	0,00	1.250.000.000,00	2.037.062.000,00	866.514.395,00	1.250.000.000,00	2.056.514.395,00	19.452.395,00	0,95	
		0,00	0,00	787.062.000,00	0,00	1.250.000.000,00	2.037.062.000,00	866.514.395,00	1.250.000.000,00	2.056.514.395,00	19.452.395,00	0,95	
		0,00	0,00	3.246.940.000,00	0,00	3.999.728.368,00	7.246.868.368,00	2.512.066.113,00	3.999.728.368,00	6.511.294.571,00	(734.573.797,00)	(10,14)	
		0,00	0,00	3.144.640.000,00	0,00	3.999.728.368,00	7.144.368.368,00	2.511.066.113,00	3.999.728.368,00	6.511.294.571,00	(734.573.797,00)	(10,14)	
		0,00	0,00	800.858.000,00	0,00	1.300.000.000,00	2.100.858.000,00	478.896.130,00	1.300.000.000,00	1.721.961.870,00	(378.896.130,00)	(15,33)	
		0,00	0,00	800.858.000,00	0,00	1.300.000.000,00	2.100.858.000,00	478.896.130,00	1.300.000.000,00	1.721.961.870,00	(378.896.130,00)	(15,33)	
		0,00	0,00	13.477.406.000,00	0,00	31.446.208.139,00	44.923.614.139,00	7.719.872.250,00	34.184.300.349,00	41.904.172.599,00	(3.021.891.644,00)	(6,71)	
		0,00	0,00	5.395.567.000,00	0,00	12.251.227.200,00	18.250.794.200,00	2.004.226.122,00	13.631.627.200,00	15.635.853.322,00	(2.004.226.122,00)	(14,33)	
		0,00	0,00	5.995.957.000,00	0,00	10.251.227.200,00	16.250.794.200,00	2.004.226.122,00	12.131.627.200,00	14.135.853.322,00	(2.004.226.122,00)	(16,51)	
		0,00	0,00	2.352.905.000,00	0,00	3.964.339.000,00	6.317.244.000,00	1.879.066.382,00	4.121.832.200,00	6.000.905.792,00	(317.398.418,00)	(5,02)	
		0,00	0,00	2.331.905.000,00	0,00	3.964.339.000,00	6.316.244.000,00	1.879.066.382,00	4.121.832.200,00	6.000.905.792,00	(317.398.418,00)	(5,02)	
		0,00	0,00	1.623.916.000,00	0,00	2.500.000.000,00	4.123.916.000,00	1.010.250.009,00	2.500.000.000,00	3.510.250.009,00	(613.665.991,00)	(14,86)	
		0,00	0,00	1.623.916.000,00	0,00	2.500.000.000,00	4.123.916.000,00	1.010.250.009,00	2.500.000.000,00	3.510.250.009,00	(613.665.991,00)	(14,86)	
		0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.639.758.000,00	0,00	7.481.052.800,00	9.120.810.800,00	1.191.969.316,00	8.230.507.800,00	9.424.477.116,00	303.665.316,00	3,33	
		0,00	0,00	1.639.758.000,00	0,00	7.481.052.800,00	9.120.810.800,00	1.191.969.316,00	8.230.507.800,00	9.424.477.116,00	303.665.316,00	3,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	210.950.000,00	210.950.000,00	0,00	663.237.190,00	663.237.190,00	210.950.000,00	21,40	

PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN						BELAJAR					
	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	Rp		Rp		%		Rp		Rp		Rp	
	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
dan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.990.000,00	210.990.000,00	0,00	563.237.190,00	663.237.190,00	-62.287.190,00	21,40
dan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.180.000,00	4.287.718.999,00	6.144.898.999,00	1.532.313.167,00	4.287.718.999,00	5.320.034.166,00	(234.864.831,00)	(3,66)
UMILAH	572.586.718.228,00	614.742.321.985,00	27.155.603.167,00	3,74	195.304.583.818,00	452.285.201.249,00	647.693.887.067,00	179.513.903.863,20	599.804.615.455,00	669.318.562.258,20	-41.624.679.191,20	-6,43

Ayerbaru, 9 Nopember 2013  
 BUPATI MAYBRAT  
  
 Drs. BERNARD SAGRIM, M.M.